

Memikirkan Kembali Pertahanan Pesisir Indonesia

Alban Sciascia¹, Muhammad Fauzan Malufti²

Abstrak

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia harus mampu mengamankan dan mempertahankan seluruh wilayah maritimnya. Guna mencapai hal tersebut, saat ini Indonesia sedang menjalankan program *Minimum Essential Force* (MEF) guna memodernisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Program MEF ini sendiri menghadapi berbagai tantangan salah satunya dalam aspek anggaran dan besarnya wilayah maritim yang harus dijaga. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang dapat dijalankan oleh Indonesia adalah dengan mengembangkan suatu konsep pertahanan pesisir sesuai dengan karakter geografis Indonesia yang kemudian diikuti dengan memprioritaskan pembelian dan pengoperasian aset-aset pertahanan yang sesuai dengan konsep tersebut dan menempatkannya di wilayah strategis utama yaitu wilayah titik/selat sempit atau dikenal juga dengan istilah *chokepoints*.

Kata Kunci: Wilayah Maritim, Pertahanan Pesisir, *Chokepoints*.

¹ Penulis merupakan Direktur PT Semar Sentinel Indonesia, sebuah perusahaan konsultasi. Penulis sebelumnya bertugas di perwira cadangan Angkatan Laut Perancis dengan pangkat terakhir sebagai *Liutenant Commander*. Penulis memiliki gelar PhD dalam Ilmu Politik yang berfokus pada Keamanan Maritim. Pandangan yang dituliskan dalam Jurnal ini bersifat personal. alban@semar-sentinel.com

² Penulis merupakan Sarjana Hubungan Internasional yang memiliki fokus pada isu-isu Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Sebelumnya bekerja sebagai staf magang di Kementerian Pertahanan Indonesia, *Research Intern* di CSIS Jakarta, dan penulis di media massa. Saat ini bekerja sebagai *research analyst* di PT Semar Sentinel Indonesia. Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini bersifat personal. Fauzan@semar-sentinel.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia masih tertinggal dalam hal mengamankan dan mempertahankan wilayah maritimnya. Mengamankan dan mempertahankan wilayah laut luas yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dan empat selat strategis utama dengan sumber daya, khususnya anggaran, yang terbatas memang merupakan tugas yang sangat berat sehingga pada titik tertentu muncullah pilihan untuk memprioritaskan pertahanan di empat *chokepoints* jalur pelayaran internasional yang ada di Indonesia: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok/Ombai-Wetar, dan Selat Makassar. Adapun salah satu cara untuk mempertahankan keempat *chokepoints* ini adalah dengan mengembangkan konsep pertahanan pesisir (*coastal defence*) yang berdasarkan pada dua dimensi: memilih aset (sistem persenjataan, *platform*, peralatan, dsb.) yang sesuai dengan implementasi strategis dan memikirkan kembali konsep pertahanan pesisir yang sesuai dengan karakter geografis Indonesia dan konsep pertahanan total (*total defence*). Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan perspektif operasional -bukan konseptual- yang independen mengenai bagaimana konsep

pertahanan pesisir Indonesia dapat diterapkan.

METODOLOGI

Artikel ini dibuat melalui metode studi literatur dengan menggunakan berbagai kepustakaan yang bersifat *online* maupun *offline* seperti buku, artikel, dan dokumen resmi pemerintah.

PEMBAHASAN

Pengendalian Laut, Pencegahan Laut, dan Pentingnya Pertahanan Pesisir

Pertahanan pesisir dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan suatu negara untuk melindungi garis pantainya melalui serangkaian sistem pertahanan. Secara historis, pertahanan pesisir harus dipahami sebagai seperangkat tindakan atau kebijakan yang diambil suatu negara untuk mencegah (*deter*) masuknya musuh atau, dalam skenario terburuk, menangkal serangan musuh di garis pesisirnya. Dalam sejarahnya, selama berabad-abad pertahanan pesisir hadir utamanya dalam bentuk sistem perkubuan atau benteng statis atau dengan kata lain suatu postur atau strategi yang bersifat defensif. Pertahanan pantai sendiri dilihat oleh banyak ahli angkatan laut, seperti A.T. Mahan, sebagai bagian dari konsep pengendalian laut (*sea control*). Barulah

pada pertengahan abad ke-20 muncul beberapa pendapat dari beberapa ahli lain, diawali oleh René Daveluy dan Raoul Castex (Coutau-Bégarie, 2004) kemudian dijelaskan secara jelas oleh Bernard Brodie (Brodie, 1942), yang melihat bahwa pengendalian laut berbeda dengan konsep pencegahan laut (*sea denial*) yang kemudian didukung oleh perkembangan teknologi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Ide utama dari pengendalian laut sendiri adalah suatu negara dapat mencegah musuh melintasi atau beroperasi di suatu wilayah maritim tanpa harus memiliki kendali (*control*) atas wilayah maritim tersebut. Pada titik tertentu, konsep pengendalian laut kemudian mengubah konsep pertahanan pesisir dalam dua aspek yaitu pertahanan pesisir tidak lagi hanya terbatas pada aset-aset atau postur defensif melainkan juga dapat bersifat ofensif serta pertahanan pesisir juga dapat dilakukan di lepas pantai. Dengan kata lain, kemajuan teknologi telah mengubah konsepsi pertahanan maritim sehingga membuat negara-negara yang memiliki pantai (*coastal states*) mengadopsi strategi dan mengembangkan pemahaman komperhensif yang berbeda tentang bagaimana cara mempertahankan wilayah maritimnya masing-masing.

‘See farther, target wiser, deter better’.

Perkembangan teknologi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua telah merubah secara total gagasan bagaimana cara mempertahankan dan mengamankan wilayah maritim. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat konsep pertahanan pesisir menjadi lebih baik dan komperhensif yang menekankan pada tiga hal: deteksi (*detection*), pelacakan (*tracking*), dan pencegahan (*deterrence*) terhadap ancaman ataupun musuh. Seiring zaman, aspek deteksi telah meningkat dengan adanya pengembangan radar, sonar, dan sistem komunikasi yang memungkinkan suatu negara untuk mendeteksi potensi ancaman dari jarak ratusan kilometer, bahkan lebih jauh lagi sensor-sensor tersebut dioperasikan dari platform yang bersifat *mobile* seperti kapal atau pesawat, dari wilayah strategisnya. Perkembangan teknologi komunikasi juga memungkinkan suatu negara untuk menggabungkan dan bertukar informasi dengan cara yang tidak hanya aman namun juga cepat dan efektif guna mendapatkan gambaran situasi yang dapat diandalkan. Terakhir, kemajuan teknologi juga telah meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menangkal potensi serangan dengan menggunakan senjata yang dapat diarahkan (*guided*) dari jarak ratusan kilometer seperti rudal anti kapal yang diluncurkan dari daratan, laut, ataupun udara.

Kemajuan teknologi ini mungkin seolah-olah menjadikan konsep pertahanan pesisir sebagai suatu konsep yang usang karena teknologi-teknologi tersebut dapat digunakan oleh kapal ataupun pesawat udara (yang tidak beroperasi di pesisir/daratan). Namun saat ini konsep pencegahan laut dan pertahanan pesisir sendiri diperbaharui dengan istilah baru yaitu *Anti-Access/Area Denial (A2/AD)*. Konsep yang digunakan secara intensif di berbagai jurnal hingga dokumen resmi negara-negara di dunia dalam beberapa tahun kebelakang ini berbicara mengenai bagaimana cara mempertahankan suatu wilayah dengan cara mencegah, memperlambat, dan atau menimbulkan kerusakan pada musuh. Contoh paling relevan dalam penggunaan konsep A2/AD adalah Tiongkok yang dalam praktiknya memiliki doktrin bahwa pertahanan pesisir yang efektif tidak hanya terdiri dari jaring pertahanan yang ada di daratan (pesisir), namun juga terdiri dari persenjataan yang dapat dikerahkan ke garis depan (*forward deployed*).

Indonesia dan Pertahanan Pesisir: Dimana, Bagaimana, dan Mengapa?

Jika melihat peta dan kondisi geografis Indonesia, penerapan strategi pertahanan pesisir yang efektif jelas dapat mendukung tujuan untuk mengamankan dan mempertahankan wilayah maritim

Indonesia dari pesisir pantai. Tidak hanya di sekitar *chokepoints*, pulau-pulau terdepan yang berada di jalur pelayaran utama seperti Natuna, Morotai, Nunukan, Biak, dan Kupang juga menjadi lokasi terbaik untuk mengimplementasikan sistem dan strategi pertahanan pesisir yang efektif. Namun, implementasi sistem dan strategi ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membatasinya baik itu anggaran, kondisi geografis, atau bahkan juga politis. Oleh sebab itu, penilaian risiko dan ancaman jangka pendek, menengah, hingga panjang menjadi aspek penting dalam menyusun konsep pertahanan pesisir Indonesia. Selain penilaian risiko dan ancaman, konsep pertahanan pesisir yang efektif juga harus terdiri dari sistem deteksi, pelacakan dan persenjataan yang terintegrasikan dalam suatu struktur komando gabungan.

Kesadaran Situational

Salah satu aspek utama dalam sistem pertahanan pesisir adalah kemampuan dalam mendeteksi target yang dapat diraih dengan mengoperasikan berbagai macam aset mulai dari radar, sonar, hingga *sonobuoys*. Namun mengoperasikan saja tidaklah cukup, suatu negara juga harus dapat mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam suatu sistem guna meningkatkan kesadaran situasional (*situational awareness*)-nya terhadap

semua aktivitas yang terjadi di wilayah maritimnya atau yang diistilahkan sebagai *recognized maritime picture* (RMP). Dengan meraih RMP, suatu negara akan dapat mendeteksi dan mengukur berbagai ancaman yang terjadi di wilayah maritimnya mulai dari pencurian ikan, penyelundupan, pembajakan, hingga pelanggaran kedaulatan secara menyeluruh dan optimal.

Selain peralatan, tentunya aspek deteksi ini tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih. Tanpa adanya integrasi aset dan SDM yang berkualitas, usaha apapun untuk mengoperasikan berbagai sensor untuk mengawasi suatu wilayah perairan tidak akan optimal atau bahkan gagal. Adapun salah satu contoh yang baik dalam aspek integrasi adalah *Indonesia Maritime Information Center* (IMIC) yang baru-baru ini diluncurkan dan dioperasikan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kembali lagi kepada penilaian risiko ancaman dan kemampuan deteksi, solusi yang paling efektif untuk Indonesia adalah dengan berfokus pada jenis aset deteksi yang paling dibutuhkan saat ini ataupun di masa depan. Salah satunya adalah radar *Over The Horizon* (OTH) yang mampu memberikan RMP dengan kemampuannya mendeteksi ancaman yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Radar OTH juga tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung

oleh jaringan sensor lainnya seperti radar maritim. Sensor lainnya yang juga sangat perlu untuk dipertimbangkan adalah sensor sejenis *Sound Surveillance System* (SOSUS) yang dikembangkan dan dipasang Amerika Serikat di dasar laut antara Greenland-Islandia-Inggris (GIUK) guna mendeteksi kapal selam Uni Soviet (kini Rusia) yang bergerak dari ataupun ke Samudra Atlantik. Sensor semacam ini menjadi penting untuk dipasang di *chokepoints* seperti Selat Makassar untuk membantu mendeteksi kapal selam dan benda bawah laut asing lainnya terlebih lagi ketika beberapa waktu kebelakang sensor dan *unmanned underwater vehicles* (UUV) asing (yang ditengarai merupakan buatan Tiongkok) beberapa kali ditemukan di perairan Indonesia.

Selain mengandalkan sensor yang ada di daratan dan laut, strategi pertahanan pesisir Indonesia juga harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi potensi ancaman dari udara dengan menggunakan aset udara seperti Pesawat Patroli Maritim (MPA) yang terbukti dapat meningkatkan keamanan maritim suatu negara (Sciascia, 2012). Kemampuan MPA untuk melaksanakan patroli dengan jangka waktu yang panjang, kecepatan yang jauh diatas kapal perang, kemampuannya untuk dapat menjadi pusat koordinasi atau bahkan menyerang musuh jika ia dilengkapi dengan persenjataan

seperti torpedo dan rudal menjadikan MPA sebagai salah satu '*game changer*' dalam mengamankan wilayah maritim suatu negara (Williams, 1997). Selain menggunakan pesawat, deteksi juga dapat dilakukan dengan satelit³ yang dapat mendeteksi dan melacak jejak elektromagnetik kapal-kapal yang melintas di suatu perairan. Beberapa penyedia jasa satelit sendiri sudah menawarkan kemampuan deteksi ini dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibanding satelit militer konvensional.

Pelacakan Dan Pemantauan

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kesadaran situasional hanya bisa diraih melalui integrasi informasi dan analisis akurat terhadap ancaman yang terdeteksi. Informasi dan analisis ini kemudian akan digunakan untuk mengawasi ancaman tersebut sampai pada suatu titik tertentu bentuk intervensi (*show of force*, intersepsi, sampai penindakan langsung) terhadap ancaman dirasa perlu. Agar hal ini dapat tercapai, pelacakan dan pemantauan ancaman menjadi penting dalam keamanan maritim dimana konsep pertahanan pesisir akan memiliki peran penting sebagai aset koordinasi dan diseminasi (penyebaran)

informasi. Lebih lanjut lagi, integrasi, analisis, dan penyebaran informasi juga harus bertumpu pada suatu pusat komando dan kendali yang tidak hanya bisa dilakukan oleh pesawat, melainkan juga bisa dilakukan oleh pusat pengendalian yang berada di daratan.

Mencegah atau Menindak

Konsep pertahanan pesisir juga dapat mengandalkan aset lainnya guna mencegah atau bahkan melakukan penindakan terhadap ancaman yang ada. Subbahasan terakhir ini akan menjelaskan dua contoh aset yang dapat memperkuat pertahanan maritim Indonesia dan sesuai dengan konsep pertahanan pesisir: sistem rudal anti-kapal berbasis darat (*land-based anti-ship missile system*) dan kapal selam tipe baru.

Setidaknya ada empat alasan kenapa TNI, khususnya TNI AL, perlu mengoperasikan rudal anti-kapal berbasis darat. **Pertama**, dibandingkan kapal perang khususnya kelas korvet ke atas, sistem rudal anti-kapal berbasis darat relatif lebih murah dalam hal biaya akuisisi, operasional dan perawatan. Sebagai contoh, versi darat rudal anti-kapal Exocet MM40 Blok 3 yang terdiri dari delapan rudal

³ Sebagai control satelit buatan Unseenlabs yang baru diluncurkan November 2020 dengan fokus

utama mendeteksi kapal melalui geolokasi dan jejak elektromagnetik.

dipatok dengan harga Rp1,54 triliun, lebih murah jika dibandingkan satu unit frigat kelas Perusak Kawal Rudal (PKR) / R.E Martadinata (yang juga membawa 8 rudal sejenis) seharga Rp3-4 triliun dan korvet kelas Diponegoro (yang hanya membawa 4 rudal sejenis) seharga Rp2,8 triliun. Perbedaan harga ini akan semakin besar jika sistem rudal anti-kapal berbasis darat buatan negara lain lain seperti *Naval Strike Missile* (NSM) buatan Norwegia, K-300 Bastion buatan Rusia, atau Neptune dari Ukraina ikut dibandingkan. **Kedua**, kesiapan operasional (*operational readiness*) yang lebih tinggi. Selama berdinamika, ada saat di mana suatu KRI tidak dapat dioperasikan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun karena KRI tersebut berada di dok dalam rangka perbaikan ataupun modernisasi. Artinya, dalam jangka waktu yang sama sistem persenjataan yang ada di kapal tersebut, termasuk rudal anti-kapal-nya, juga tidak dapat digunakan. Hal ini berbeda dengan sistem rudal anti-kapal berbasis darat yang tidak hanya memiliki waktu atau periode pemeliharaan dan perawatan (harwat) yang jauh lebih sedikit, namun pemeliharaan dan perawatan tersebut juga bisa dilakukan lebih cepat bahkan secara *on site*. Ini artinya sistem rudal anti-kapal berbasis darat dapat memberikan kehadiran (*presence*) aset anti-kapal yang

lebih permanen tidak hanya di wilayah *chokepoints*, namun juga di pulau-pulau strategis terluar seperti Natuna dan Morotai. Selain itu, mengingat sebagian besar fasilitas perbaikan kapal perang Indonesia hanya terletak di beberapa lokasi tertentu di Pulau Sumatra dan Jawa, waktu absennya suatu KRI dari wilayah *chokepoints* atau terluar Indonesia menjadi bertambah mengingat waktu yang dibutuhkan untuk berlayar dari dan ke fasilitas perbaikan kapal baik sebelum maupun setelah perbaikan atau modernisasi selesai.

Ketiga, *Survivability* di mana sistem rudal anti-kapal berbasis darat yang bersifat mobil (*mobile*) atau terpasang pada platform kendaraan seperti truk dapat bergerak dengan mudah dan cepat guna memanfaatkan fitur-fitur alam yang banyak tersedia di Indonesia, utamanya hutan dan pegunungan, untuk menghindari deteksi musuh. Terlebih lagi ketika semua *chokepoints* Indonesia terletak di antara pulau-pulau besar: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok. Oleh karena itu, jika dioperasikan secara ideal, musuh akan lebih sulit untuk menemukan dan menghancurkan sistem rudal anti-kapal berbasis darat TNI dibanding KRI. **Keempat**, fleksibilitas. Sistem rudal anti-kapal berbasis darat akan memberikan TNI pilihan lain selain

mengerahkan KRI-nya jika suatu wilayah *chokepoints* membutuhkan peningkatan pengawasan dan keamanan ancaman permukaan mengingat hampir seluruh sistem rudal anti-kapal berbasis darat modern juga terdiri dari radar dan sensornya sendiri. Adanya pilihan lain ini akan mengurangi beban armada TNI AL yang saat ini masih kekurangan jumlah kapal sehingga KRI yang ada bisa dikirim ke wilayah lain yang lebih membutuhkan. Aspek fleksibilitas ini juga mencakup kemampuan sistem rudal anti-kapal berbasis darat untuk diintegrasikan dengan sistem C4ISR TNI yang sudah beroperasi ataupun akan dioperasikan melalui kemampuan berbagi data lintas platform (*cross-platform data sharing*). Kemampuan ini juga akan meningkatkan aspek *survivability* karena memungkinkan sistem rudal anti-kapal berbasis darat untuk tetap bersembunyi atau setidaknya meminimalisir kebutuhannya untuk bergerak karena deteksi dan akuisisi target penembakan bisa dilakukan oleh aset lain, begitupun sebaliknya. Namun untuk mendapatkan keunggulan ini, TNI harus memilih sistem sistem rudal anti-kapal berbasis darat dengan interoperabilitas terbaik sesuai dengan komposisi alutsista yang ada dan yang akan datang.

Dengan keempat aspek ini, rudal anti-kapal berbasis darat dapat digelar dan

digunakan di *chokepoints* guna mendukung aset TNI yang sudah ada dengan menawarkan solusi untuk memiliki kehadiran aset anti-permukaan yang lebih permanen dengan fleksibilitas tinggi dan biaya yang lebih murah.

Aset kedua yang dapat memperkuat pertahanan maritim Indonesia adalah kapal selam. Isu mengenai kapal selam sendiri sedang cukup ramai dibicarakan mengingat Kementerian Pertahanan sedang berencana untuk membeli kapal selam jenis baru. Saat ini di dalam TNI AL, terdapat dua pemikiran yang berbeda kapal selam. Ada pihak yang beranggapan bahwa aspek *stealthy* dan propulsi (penggerak) yang senyap seperti penggunaan *air-independent propulsion* (AIP) harus diutamakan sementara pihak lainnya percaya bahwa kapal selam harus dilihat sebagai aset ofensif dan kemampuan pengganda (*multipliers*) lainnya, seperti rudal anti kapal, juga harus diutamakan. Dengan kata lain, dua pemikiran yang berbeda mengenai apa kemampuan yang harus dimiliki oleh suatu kapal selam ini juga memberikan dua pandangan yang berbeda dalam mengintegrasikan aset strategis berupa kapal selam dalam konsep pertahanan pesisir Indonesia. Pemikiran yang pertama, yang mendukung penggerak AIP, melihat bahwa kapal selam utamanya merupakan

aset untuk mengumpulkan informasi intelijen. Propulsi AIP memang lebih sunyi untuk mendukung fungsi ini namun ia berpotensi menimbulkan masalah keamanan (*safety*) dan kendala logistik mengingat propulsi ini bergantung pada konversi elektromekanis oksigen menjadi hydrogen (Pertiwi, Ali, 2021). Disisi lain, mereka yang mendukung penggunaan propulsi jenis lain yaitu baterai *Lithium-Ion* (Li-ion) melihat bahwa sebagai aset strategis, fungsi kapal selam tidak dapat dibatasi hanya pada pengumpulan intelijen. Selain itu, perspektif ini juga melihat bahwa kapal selam yang dilengkapi rudal anti kapal dan komunikasi yang aman (*secured communication*) merupakan aset ofensif yang efektif yang juga dapat menjalankan misi pengumpulan intelijen. Artikel yang baru-baru ini dimuat di Jakarta Post dan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selama Rapat Pimpinan TNI tahun 2021 sendiri cenderung mendukung gagasan bahwa Indonesia membutuhkan kapal selam yang tidak hanya membayangi musuh, namun juga dapat menghalangi dan melawan musuh.

KESIMPULAN

Artikel ini menyebutkan beberapa daftar aset yang mungkin terlihat seperti daftar belanja yang luar biasa besar. Akan tetapi, artikel ini memberikan gambaran

umum tentang apa saja aset penting yang harus hadir dalam konsep pertahanan pesisir Indonesia yang ideal. Perlu digarisbawahi bahwa aset-aset tersebut tidak akan berarti tanpa adanya konsep operasional yang baik, strategi yang jelas dengan capaian yang ditentukan, koordinasi yang baik, serta SDM yang kompeten dan terlatih. Dengan kata lain, selagi Indonesia terus memodernisasi angkatan bersenjata melalui program MEF, harus ada perhatian lebih yang diberikan pada adanya strategi komperhensif dalam mengamankan dan mempertahankan wilayah kedaulatan maritimnya. Oleh karenanya prioritas yang jelas dalam pengadaan alutsista harus dilakukan dengan mengingat bahwa suatu konsep strategi dapat dikembangkan dari perspektif operasional.

Daftar Pustaka

Coutau-Bégarie, H.2004. *Les lignes directrices de la pensée navale au XX^e Guerres Mondiales Et Conflits Contemporains*.

Brodie, B., 1941. *Sea Power in the Machine Age*. Princeton: Princeton University Press.

Brodie, B., 1942. *A Layman's Guide to Naval Strategy*. Princeton: Princeton University Press.

Sciascia, A. 2012. Aircraft to monitor maritime domain suits Indonesia. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2012/04/27/aircraft-monitor-maritime-domain-suits-indonesia.html>. 22 Februari 2021 (09:00).

Vavasseur, X. 2020. Unseenlabs Ready To Launch Satellites Constellation Dedicated To Ship Geolocation. Naval News. <https://www.navalnews.com/naval-news/2020/11/unseenlabs-ready-to-launch-satellites-dedicated-to-ship-geolocation/> 22 Februari 2021 (10:30).

Pertiwi, K. & Ali, A., 2021. The Right Submarine Will Protect Our Waters. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/02/21/the-right-submarine-will-protect-our-waters.html>. 22 Februari 2021 (15.00).